

BAB II

SEJARAH DAN PASANG SURUT HUBUNGAN INDONESIA – TAIWAN

Dalam bab ini, berisi tentang sejarah dan pasang surut hubungan Indonesia – Taiwan. Pembahasan ini akan dibagi menjadi dua sub-bab. Sub-bab yang pertama akan membahas tentang sejarah hubungan Indonesia – Taiwan. Kemudian pada sub-bab kedua akan membahas tentang pasang surut hubungan Indonesia – Taiwan.

A. SEJARAH HUBUNGAN INDONESIA – TAIWAN

Saat ini, Indonesia tidak secara resmi mengakui Taiwan sebagai sebuah negara karena mengadopsi Kebijakan Satu China. Indonesia secara resmi hanya mengakui Republik Rakyat China sejak 1950.¹

Taiwan, secara resmi *Republic of China* (ROC), adalah sebuah negara di Asia Timur.² Di sebelah barat bertetangga dengan China (secara resmi Republik Rakyat China atau RRC), di timur laut ada Jepang, dan selatan ada Filipina. Taiwan adalah negara yang paling padat penduduknya yang bukan anggota dari PBB (Perserikatan Bangsa – Bangsa), dan salah satu dengan perekonomian terbesar.

Taiwan dihuni oleh penduduk asli Taiwan sebelum abad ke-17, ketika koloni Belanda dan Spanyol membuka pulau ke Han Cina imigrasi. Setelah aturan singkat oleh Kerajaan Tungning, pulau dianeksasi oleh dinasti Qing, dinasti terakhir China. Qing menyerahkan Taiwan ke Jepang pada tahun 1895 setelah Perang Sino - Jepang. Sementara Taiwan berada di bawah kekuasaan Jepang, yang Republik China (ROC) didirikan di daratan pada tahun 1912 setelah jatuhnya dinasti Qing. Setelah Jepang menyerah kepada

¹ Julia Suryakusuma (3 October 2012). "Viewpoint: Indonesia-Taiwan ties: When gray is good". The Jakarta Post.

² "Profil negara Taiwan": <http://www.bbc.com/news/world-asia>. 20 Mei 2016.

Sekutu pada tahun 1945, ROC (*Republic of China*) menguasai Taiwan. Namun, kembalinya dari Perang Saudara China menyebabkan kerugian *Republic of China* (ROC) dari daratan ke Komunis, dan pergantian dari pemerintah ROC (*Republic of China*) ke Taiwan pada tahun 1949. Meskipun *Republic of China* (ROC) terus mengklaim sebagai pemerintah yang sah dari China, yurisdiksi efektif sejak tahun 1949 telah terbatas Taiwan dan pulau-pulau sekitarnya, dengan pulau utama yang membentuk 99% dari yang *de facto* wilayah. Sebagai anggota pendiri PBB (Perserikatan Bangsa – Bangsa), ROC (*Republic of China*) terus mewakili China di (Perserikatan Bangsa - Bangsa) PBB sampai tahun 1971, ketika RRC (Republik Rakyat China) diasumsikan kursi China, menyebabkan ROC (*Republic of China*) kehilangan keanggotaan PBB (Perserikatan Bangsa – Bangsa) -nya.

Pada awal 1960-an, Taiwan memasuki masa pertumbuhan ekonomi yang cepat dan industrialisasi, menciptakan ekonomi industri yang stabil. Pada 1980-an dan awal 1990-an, itu berubah dari satu partai kediktatoran militer didominasi oleh Kuomintang ke demokrasi multi partai dengan hak pilih universal. Taiwan adalah ekonomi 22 terbesar di dunia, dan yang berteknologi tinggi industri memainkan peran kunci dalam ekonomi global.

RRC (Republik Rakyat China) secara konsisten telah mengklaim kedaulatan atas Taiwan dan menegaskan ROC (*Republic of China*) adalah tidak sah. Di bawah Kebijakan Satu China, RRC (Republik Rakyat China) menolak hubungan diplomatik dengan negara yang mengakui (*Republic of China*) ROC. Hanya beberapa negara yang lebih kecil mengakui ROC (*Republic of China*) sebagai wakil tunggal hukum China. Seperti di Afrika: Burkina Faso (1994), Sao Tome and Principe (1997) dan Swaziland (1968). Di Eropa, Tahta Agung Vatikan (1942). Di Oseania: Kiribati (2003), Kepulauan Marshall (1998), Nauru (1980–2002, 2005), Palau (1999), Kepulauan Solomon (1983), Tuvalu (1979). Dan

di Amerika: Belize (1989), Dominika (1957), El Salvador (1961), Guatemala (1960), Haiti (1956), Honduras (1965), Nikaragua (1990), Panama (1954), Paraguay (1957), Saint Kitts and Nevis (1983), Saint Lucia (1984–1997, 2007) dan Saint Vincent and the Grenadines (1981).³ Tetapi banyak juga negara-negara lain yang mempertahankan hubungan tidak resmi melalui kantor perwakilan dan lembaga yang berfungsi sebagai *de facto* kedutaan dan konsulat. Meskipun sepenuhnya pemerintahan Taiwan sendiri, sebagian besar organisasi internasional dimana RRC (Republik Rakyat China) berpartisipasi baik, menolak untuk memberikan keanggotaan ke Taiwan atau memungkinkan untuk berpartisipasi hanya sebagai aktor non-negara. Republik Rakyat China (RRC) telah mengancam penggunaan kekuatan militer dalam menanggapi setiap pernyataan resmi kemerdekaan oleh Taiwan, jika pemimpin RRC (Republik Rakyat China) memutuskan bahwa penyatuan damai tidak mungkin lagi.⁴

Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945 dan memenangkan pengakuan pada tahun 1949, Indonesia sempat mengakui *Republic of China* (ROC) antara periode 1949 sampai 1950. Namun, setelah kekalahan dari Tentara Revolusioner Nasional untuk Tentara Pembebasan Rakyat, dan mundur ke Taiwan, pada tahun 1950 Indonesia bergeser pengakuan resmi terhadap Republik Rakyat China dan memilih untuk Kebijakan Satu China.

Indonesia dan Taiwan tidak memiliki hubungan diplomatik, karena Indonesia menganut Kebijakan Satu China (*One China Policy*). Namun kerjasama kedua pihak

³ *Sejarah KDEI Taipei*: <http://www.kdei-taipei.org/>.

⁴ "Teks dari Anti-Secession Law". *Harian Rakyat*. 14 Maret 2005.

berjalan dengan baik, bahkan menunjukkan banyak kemajuan di bidang ekonomi, perdagangan, pendidikan, dan ketenagakerjaan.⁵

Indonesia seperti negara-negara lainnya tidak mempunyai hubungan diplomatik resmi dengan Republik Tiongkok. Namun hubungan Indonesia dengan Taiwan sudah terjalin sejak 1967, semakin kuat saat ini, termasuk dalam hubungan perdagangan. Hubungan kedua negara diawali tatkala pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto menempatkan petugas Badan Koordinasi Intelijen (BAKIN) sebagai perwakilan pemerintah Indonesia di Taipei.

Pada 1970, perwakilan ini kemudian diorganisasi secara resmi dengan membentuk Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Taipei, yang beranggotakan petugas intelijen dari BAKIN (Badan Koordinasi Intelijen) dan petugas imigrasi dari Departemen Kehakiman.

Sehubungan dengan perkembangan penanaman modal di Indonesia, tahun 1970 dibentuklah Kamar Dagang Indonesia (KADIN). Hubungan ekonomi menjadi salah satu misi utama KADIN (Kamar Dagang Indonesia) Taipei. Indonesia kemudian menempatkan pejabat bidang ekonomi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Departemen Perindustrian.

Pemerintah Indonesia kemudian meningkatkan status KADIN (Kamar Dagang Indonesia) Taiwan menjadi Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taiwan pada tanggal 7 Juli 1994, dan KDEI (Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia) secara resmi dibina di bawah naungan Departemen Perdagangan. Sebelum ini, (Kantor Dagang dan

⁵ *Presiden Baru Dilantik, Hubungan Taiwan-Indonesia Meningkat:*
<https://m.tempo.co/read/news/2016/06/01/090775847/presiden-baru-dilantik-hubungan-taiwan-indonesia-meningkat>, Rabu, 01 Juni 2016.

Ekonomi Indonesia) KADIN masih berada di bawah binaan BAKIN (Badan Koordinasi Intelijen Negara).

Status KDEI (Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia) adalah lembaga non-pemerintah yang bersifat ekonomi, namun melingkupi perdagangan dan imigrasi. Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) juga bertugas melindungi kepentingan warga negara Indonesia yang berdomisili di Taiwan, yang mayoritas berstatus tenaga kerja ataupun mahasiswa dan pelajar.⁶

Dengan adanya “Kebijakan Satu China” yang diadopsi Indonesia, membuat Indonesia hanya menjalin hubungan dagang dengan Taiwan. Saat ini, kedua negara memiliki hubungan setengah resmi karena hubungan diplomasi resmi hanya pada *One China Policy*. Hubungan non-diplomatik Indonesia dan Taiwan telah berkembang, terutama pada perdagangan, pariwisata pertanian, dan ekonomi.⁷

Indonesia – Taiwan sudah melakukan nota kesepahaman untuk menghilangkan pajak berganda agar investasi Taiwan ke Indonesia terus meningkat. Sejak 1995, sudah ada penandatanganan *Prevention of Fiscal Evasion Agreement* atau penghindaran pajak berganda, sehingga memungkinkan terjadinya kenaikan investasi dan perdagangan.⁸

B. PASANG SURUT HUBUNGAN INDONESIA – TAIWAN

Indonesia adalah mitra dagang Taiwan yang penting. Untuk menghadapi persaingan globalisasi, transparansi perdagangan dan pasar bebas, juga perubahan jaringan perdagangan

⁶ *Hubungan luar negeri Taiwan*: <http://www.kdei-taipei.org>.

⁷ *Hubungan Indonesia-Taiwan Meningkat Pesat*: <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/05/11/m3va1i-hubungan-indonesiataiwan-meningkat-pesat>, Jumat, 11 Mei 2012.

⁸ *Ibid.*

yang kian cepat, maka dibentuklah sebuah organisasi, TAITRA (*Taiwan External Trade Development Council*). TAITRA (*Taiwan External Trade Development Council*) adalah penggabungan organisasi masyarakat berbadan hukum di bawah naungan Biro Perdagangan Luar Negeri dengan tujuan membantu industri Taiwan memperluas perdagangan. Sekarang ini terdapat hampir 50 kantor TAITRA (*Taiwan External Trade Development Council*) diluar negeri yang ditempatkan di berbagai belahan dunia. Berharap dengan adanya TAITRA (*Taiwan External Trade Development Council*) akan semakin meningkatkan kemampuan pemasaran internasional dari berbagai sudut, memberikan layanan yang paling cepat dan efektif, secara *continue* berkerjasama dengan pengusaha untuk perkembangan ekonomi Taiwan yang stabil.⁹

Taiwan menilai, Indonesia masih kurang bisa mengimbangi sikap persahabatan yang diulurkan Taiwan. Kebijakan *One China Policy* dianggap kurang bersahabat. Di sektor bisnis, Indonesia amat akrab dengan Taiwan. Taiwan adalah macan ekonomi Asia yang menjadi salah satu mitra ekonomi terbesar bagi Indonesia. Hubungan ekonomi Indonesia – Taiwan mengalami pasang surut. Selain pengaruh global, pengaruh hubungan bilateral cukup mewarnai pasang surut tersebut.

Taiwan kini berada pada urutan delapan untuk *Foreign Direct Investment* (FDI) di Indonesia. Bahkan untuk kawasan Asia, Taiwan masuk ke jajaran tiga investor terbesar di Indonesia, setelah Singapura dan Jepang.

Namun, berbeda dengan FDI (*Foreign Direct Investment*) lain, hubungan Indonesia dengan Taiwan memang unik. Maju dalam kerjasama bidang ekonomi, namun terganjal di

⁹ “TAITRA”: <http://www.taiwanexcellence.com.tw/id/about-us-TAITRA.aspx>.

bidang diplomatik. Hingga saat ini, Taiwan kadang mengeluhkan sikap Indonesia yang amat membatasi kerjasama dengan Taiwan.

Indonesia memegang prinsip *One China Policy* sehingga tak banyak bermanuver ketika China menganggap Taiwan sebagai salah satu provinsinya yang memberontak. Ini merupakan titik sensitif hubungan bilateral Indonesia dan Taiwan. Pada sisi lain, Indonesia pun harus bersikap pragmatis, yaitu membutuhkan Taiwan sebagai investor.

Hubungan sensitif antara Indonesia – Taiwan pun tergambar dalam sebuah insiden. Ketika Wakil Presiden Taiwan, Annette Lu, siap melakukan kunjungan ke Indonesia. Ketika rencana itu dimuat media dalam negeri, Kedutaan China pun melayangkan keberatannya kepada Indonesia. China menyayangkan Indonesia karena dinilai tak konsisten memegang prinsip *One China Policy*. Kunjungan Lu akhirnya batal.

Dampak diplomatik pun dirasakan di bidang kerjasama ekonomi. Pada 1994, Taiwan mengikuti pertemuan informal yang kemudian melahirkan *Asia Pacific Economy Cooperation* (APEC). Namun saat pemerintahan Indonesia dipimpin Presiden Abdurrahman Wahid, Indonesia menjalin hubungan erat dengan China. Hal ini melahirkan kekhawatiran Indonesia dalam menghadapi Taiwan.

Thomas Darmawan, ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia mengatakan, dirinya menyayangkan adanya sikap resmi yang juga diikuti oleh praktisi bisnis. Para bebisnis pun ikut menerapkan sikap resmi pemerintah Indonesia. Padahal, untuk bidang ekonomi tidak ada masalah. Bahkan banyak pengusaha Taiwan yang menanamkan investasinya di China.¹⁰

¹⁰ Yeyen Rostiyani. *Pasang Surut Investasi di Balik Hambatan Diplomatik*: <http://madani-ri.com/web/?p=2545>, Senin, 04 Januari 2010.

Menurut pengamat ekonomi senior, Umar Juoro, hambatan bagi hubungan Indonesia - Taiwan bukan hanya soal pengakuan diplomatik semata. Kondisi global yang dirundung krisis pun menjadi pengganjal. Bagi Taiwan, masa-masa ini berat karena mereka bergantung pada ekspor. Jadi ketika krisis menghantam, Taiwan terpukul. Beda dengan Indonesia yang amat mengandalkan perekonomian domestik.

Menurut seorang staf TETO (*Taipei Economic and Trade Office*), prospek kerjasama bilateral ke depan, semua tergantung situasi terkini di Indonesia. Pertimbangan ini tentu sama dengan para investor dari negara lain. Memang ada kekhawatiran mengenai Upah Minimum Regional (UMR) sehingga tenaga kerja tak lagi murah.

Seorang staf TETO (*Taipei Economic and Trade Office*) mengakui, kerjasama dengan Taiwan memang lebih mudah terjalin bagi warga Indonesia keturunan China. Sederet pembenahan infrastruktur pun kian tak sabar menanti wujud nyata pemerintah Indonesia. Salah satu sandungan bagi promosi produk Indonesia di pasar global adalah biaya kemasan yang relatif lebih mahal dibanding negara Asia lainnya. Untuk produk makanan dan minuman misalnya, kemasan kaleng dan plastik di Indonesia terhitung mahal. Akibatnya, bea masuk untuk produk jadi akan lebih murah dibanding produk serupa yang dikemas di Indonesia.

Bahkan penelitian oleh *Asia Foundation* menyebutkan, biaya transportasi produk di Indonesia termahal di dunia. Untuk transportasi barang, tarif Indonesia adalah 34 sen dolar AS per kilometer. Padahal di Thailand, tarifnya 22 sen dolar AS per kilometer. Akibatnya, harga barang Indonesia jatuhnya lebih tinggi.

Sepertinya, Indonesia mendapat tantangan untuk memperbarui hubungannya dengan Taiwan, terutama di bidang bisnis. Tak hanya menarik investasi Taiwan, namun juga siap menghadapi kawasan perdagangan bebas.

Kebijakan *One China Policy* yang dipegang Indonesia diakui menjadi salah satu sandungan dalam menjalin hubungan Taiwan dan Indonesia. Namun menurut Samuel CY Ku dari National Sun Yat Sen University Taiwan, tak menampik adanya peningkatan hubungan kedua Negara antara Indonesia - Taiwan dalam satu dekade terakhir. Meski Indonesia yang dinilai masih kurang bisa mengimbangi sikap persahabatan yang diulurkan Taiwan.

Menurut Samuel CY Ku, semakin banyak orang yang melakukan hubungan antara kedua negara, dibanding sebelum 1990-an. Dulu, pihak yang terlibat hanya orang-orang bisnis dan petinggi pemerintah. Namun sekarang, ada mahasiswa, budayawan, aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lain-lain. Bahkan akhir-akhir ini semakin banyak mahasiswa S2 di Taiwan yang kian tertarik untuk menulis tesis tentang Indonesia, lanjut profesor bidang hubungan internasional ini.

Indonesia dinilai menarik karena memiliki daya tarik bisnis yang signifikan. Selain itu juga dorongan regionalisasi yang kian kuat. Termasuk bidang ekonomi. Samuel memprediksi hubungan perdagangan kedua negara akan terjadi peningkatan. Namun, ia mengingatkan sandungan *One China Policy*. Menurutnya, bagi Taiwan kebijakan tersebut dinilai kurang bersahabat. Penerapan kebijakan tersebut di lapangan disebutnya terlalu kaku dan konservatif.

Taiwan tidak meminta Indonesia mengubah kebijakannya. Cukup dengan bersikap lebih terbuka, lebih bersahabat, dengan bersikap saling menghormati seperti halnya Taiwan menghormati Indonesia.¹¹

Pasang surut hubungan Indonesia – Taiwan terlihat jelas dari beberapa kasus. Seperti pada tanggal 9 Juni 2010, *Food and Drugs Administration* (FDA) Taiwan melayangkan surat teguran kepada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taiwan karena produk Indonemie tidak sesuai persyaratan FDA (*Food and Drugs Administration*). Direktur Indofood Sukses Makmur, Franciscus Welirang mengatakan, “Dalam surat itu juga dicantumkan tanggal pemeriksaan Indomie dari Januari - 20 Mei 2010 terdapat bahan pengawet yang tidak diizinkan di Taiwan dibumbu Indomie goreng dan saus barberque”.

Dalam kasus penarikan Indomie di Taiwan ternyata bermula pada 9 Juni 2010 saat KDEI (Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia) di Taiwan mendapatkan surat dari *Food and Drugs Administration* (FDA) Taiwan yang memberitahukan mie instan produk Indofood tidak sesuai persyaratan FDA (*Food and Drugs Administration*).

Franciscus Welirang yang didampingi direktur Indofood lainnya mengatakan, pertengahan Juni 2010 Indofood telah merespon surat itu. Namun, dalam surat balasan tersebut, Indofood menyatakan selalu menyesuaikan persyaratan dan peraturan yang berlaku di Taiwan. Pada 2 Juli 2010 Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan Importir tunggal Indomie di Taiwan saling bertemu untuk merencanakan Nota Kesepahaman.

¹¹ Ibid.

Menurut Franciscus, Indomie sendiri memiliki dua jenis label Indomie untuk ekspor dan domestik. Sejak Juli hingga awal Oktober 2010, Fransiscus tidak mendengar masalah apapun terhadap Indomie yang diekspor ke Taiwan. Pada 8 Oktober 2010 tiba-tiba mendengar pengumuman di media Taiwan dan Hongkong, bahwa dikecap Indomie terdapat pengawet yang tidak sesuai.

Atas laporan inilah kemudian pihak Indofood mencari fakta di Taiwan untuk mencari tau apa yang sebenarnya terjadi.

Mendag (Menteri Perdagangan) RI (Republik Indonesia) meminta Taiwan untuk memberikan klarifikasi tentang adanya dua standar yang berbeda tetapi kedua-duanya diakui secara internasional dan produk yang memenuhi standar tersebut aman untuk konsumen. Selain itu produk yang masuk melalui jalur distribusi Indofood sudah memenuhi standar Taiwan. Mendag (Menteri Perdagangan) juga meminta otoritas setempat meletakkan persoalan ini secara proporsional tidak menyamaratakan semua produk yang beredar di Taiwan yang masuk dengan cara berbeda-beda.

Mendag (Menteri Perdagangan) juga meminta kerjasama otoritas Taiwan untuk memperlakukan isu tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam perdagangan internasional dan melakukan komunikasi dengan otoritas yang berkompeten untuk bidang itu. Berdasarkan rilis Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI (Republik Indonesia), produk Indomie aman dikonsumsi dan sesuai dengan standar *CODEX Alimentarius Commission* (CAC) yang diakui secara internasional.

Sementara itu, Taiwan bukanlah anggota CAC (*CODEX Alimentarius Commission*) sehingga menerapkan standar yang berbeda dengan standar internasional, sehingga ada perbedaan standar walaupun kedua standar itu diakui sebagai standar internasional dan

aman untuk konsumen. Sekretaris Jenderal Kemendag (Kementerian Perdagangan), Ardiansyah Parman, mengatakan, pada prinsipnya pemerintah mempunyai komitmen tinggi untuk melindungi keamanan konsumsi pangan.¹²

Dalam kasus lain, bidang perdagangan menerima surat pemberitahuan dari Departemen Kesehatan Taiwan mengenai impor produk gula merah dan permen asal Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan Departemen Kesehatan Taiwan karena mengandung bahan pemutih yang melebihi standar yang ditentukan dan pewarna buatan yang tidak diizinkan.

Bidang Perdagangan melakukan kunjungan ke *Food & Drug Administration* (FDA) – DOH (*Department of Health*) untuk mendapat penjelasan lebih rinci, dan dijelaskan bahwa sejak bulan Januari 2009 sampai dengan Maret 2010 terdapat 5 transaksi gula merah dan 7 transaksi permen asal Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan DOH (*Department of Health*) Taiwan.

Untuk mengantisipasi agar hal serupa tidak lagi terjadi di masa yang akan datang, Departemen Kesehatan Taiwan menghimbau agar pihak terkait di Indonesia dapat menyediakan rencana perbaikan (*improvement plan*) yang meliputi: sistem investigasi, kontrol dan evaluasi BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) terhadap produk gula merah dan permen tersebut, hasil pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap ekspor, *quality control* dari produk yang bersangkutan, langkah-langkah *preventif*, informasi tentang lembaga sertifikasi kesehatan (*Health Certificate*) yang disahkan oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) termasuk laboratorium

¹² Jhohan Dewangga. *Kronologis Penarikan Indomie Dari Taiwan*:
<https://jhohandewangga.wordpress.com/2010/10/27/analisis-kasus-indomie-di-taiwan/>.

nasional/internasional lain di Indonesia, daftar eksportir gula merah dan permen yang telah memperoleh izin dari pemerintah Indonesia.

BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) telah memberikan tanggapan mengenai kasus tersebut dan menjelaskan bahwa regulasi dan persyaratan keamanan, mutu dan nilai gizi produk olahan seperti permen mengacu kepada persyaratan internasional dan *Codex Alimentarius*. Produk pangan olahan yang diekspor/impur lazimnya dilengkapi dengan sejumlah dokumen pendukung, antara lain: *Health Certificate / Free Sales Certificate* dan sertifikat analisis. Saat ini BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) sedang melakukan investigasi lebih lanjut termasuk pengambilan sample untuk pengujian laboratorium dan koordinasi dengan sektor terkait lainnya.¹³

Di tahun 2010, dibawah kepemimpinan Chen Shui Bien, hubungan antara Indonesia dan Taiwan tidak sebaik pada masa Koumintang berkuasa. Menurunnya hubungan secara drastis ini lebih kepada perilaku dan sikap Taiwan yang berada pada dilema antara persoalan geopolitik dan geoekonomi. Keseluruhan perilaku Taiwan berubah dengan menggunakan ancaman ekonomi untuk memperoleh keuntungan diplomasi. Gagalnya kunjungan pemimpin Taiwan Chen Sui Bien untuk maksud bisnis pada bulan desember tahun 2002 membuat pemerintahan Taiwan berencana melakukan Boikot Ekonomi dan Indonesia dikeluarkan dari daftar Negara tujuan investasi Taiwan. Tetapi hal semacam ini sangat sulit dilakukan dan mungkin hanya sebatas wacana dikarenakan sudah terlalu kuatnya pengaruh perekonomian Indonesia terhadap Taiwan. Banyaknya kerjasama dan investasi disegala bidang diantara keduanya menyebabkan hal semacam itu sangat sulit

¹³ *Kasus Dagang*: <http://www.kdei-taipei.org/index.php/2014-08-11-03-58-09/sejarah-singkat/40-kdei-taipei/artikel/206-kasus-dagang>.

untuk dilakukan Taiwan dalam rangka menggoyahkan kebijakan luar negeri yang dianut Indonesia yaitu Kebijakan Satu China atau lebih dikenal *One China Policy*.

Meskipun Indonesia – Taiwan mengalami surplus, hubungan Indonesia – Taiwan masih terjalin baik. Pada pertengahan Mei 2016, Taiwan baru saja melantik Presiden wanita pertama, Tsai Ing Wen. Pemerintahan Taiwan di bawah kendali Presiden Tsai Ing Wen, ingin menjadikan Indonesia sebagai mitra dagang utama khususnya di kawasan Asia Tenggara.

Direktur Administrasi *Taipei Economic and Trade Office* (TETO) Indonesia, Tseng Wei Ming mengatakan, keinginan Taiwan menjadikan mitra dagang utama Indonesia sudah lama digagas oleh presiden, karena Indonesia bukan hanya mempunyai jumlah penduduk yang besar. Tetapi juga situasi politik dan sosial cukup kondusif yang mendorong pertumbuhan ekonomi terus stabil. Presiden Tsai Ing Wen mengatakan, ingin meningkatkan hubungan bilateral lebih kondusif dengan Indonesia, khususnya peningkatan dagang dan investasi. Meskipun Indonesia – Taiwan mengalami surplus, pemerintah Taiwan tetap konsisten akan meningkatkan jumlah investasi dan kunjungan wisata kedua negara.¹⁴

¹⁴ Danang J.M. *Indonesia Mitra Dagang Utama di Asia Tenggara*:
<http://www.netralitas.com/bisnis/read/8684/taiwan-indonesia-mitra-dagang-utama-di-asia-tenggara>.